

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.
- \_\_\_\_\_1986 - 2010. *Sukoharjo Dalam Angka*: BPS Sukoharjo
- Gujarati, Damodar. 2010. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, Andi. 2008. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Faktor-Faktor Pendukung PAD di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1991 - 2001*. Skripsi. UMS. Tidak dipublikasikan.
- Halim , Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah* . Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Himawan,2007 , “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2006*”
- Kuncoro , Mudrajad. 2006. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga
- Mardiasmo .2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Maulidiyah , m. wahyudi . 2001. “ *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* “ Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Riduansyah, Mohammad .2003 . “ *Kontribusi Pajak Daerah Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor )*” Jurnal Universitas Indonesia

Saragih , Julipanglima. 2003. *Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Skripsi. UMS. Tidak dipublikasikan.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: BPFE UI

Suparmoko . 2006 . *Ekonomi Publik , Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE

UU Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

UU Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.